

MEMAKNAI PLURALISME DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DENGAN *EMOTIONAL AND SPIRITUAL QUOTIENT* (*ESQ*)

Upaya Menjaga Keutuhan Berbangsa & Bernegara

Siti A'isyah*

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT. Aqidah Usymuni Sumenep

Abstract

Indonesia is a country made up of diverse people, tribes, ethnic or social groups, beliefs, religions, and cultures, different from one region to another region that dominates Indonesian cultural treasures. With the increasingly diverse array of community and culture, of course, each individual community has different desires. people from different areas with different backgrounds, social structure, and the characters are different, have different views in a way thinking in the face of their own lives and problems.

Keywords: Pluralism, emotional and spiritual quotient, KUB.

*) Email: aisyahsiti771@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Tahun 2002 yang lalu ada sebuah buku menarik yang ditulis oleh dua belas serjana terkemuka dan diedit oleh Freek Colombijn And J Thomas Linbald. Buku ini berjudul *the roots of violence in Indonesia*. Yang menarik adalah data-data historis yang mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa “Indonesia adalah negara yang penuh dengan kekerasan dan berbudaya kekerasan.” Sebuah kesimpulan yang memporak-porandakan *image* yang telah mapan dibangun dan dikenal bahwa bangsa ini adalah bangsa yang damai, harmonis dan beragama.

Kita tidak perlu berang dan mencaci-maki buku tersebut dan para penulisnya. Yang perlu dilakukan adalah menunjukkan bukti dalam perilaku nyata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang beretika, beradab dan beragama sebagai *encourter* terhadap buku itu. Karena sesungguhnya, berang dan caci maki tanpa adanya respon obyektif adalah salah satu bentuk dari ketidakberdayaan psikologis dan intelektual.

Menjaga citra positif bangsa adalah tugas dan kewajiban segenap anak bangsa yang telah makan, minum dan bernafas dengan udara Indonesia ini. Kalaulah pada masa lalu telah terekam sejarah yang tidak bisa lagi dihapus, yakni wujudnya kekerasan, kerusuhan, dan bentuk *social disorder* lainnya, maka sesungguhnya itu menjadi sebuah tantangan untuk mewujudkan sebuah bentuk masyarakat berbangsa yang beradab, beretika dan berdaulat sebagaimana yang memang dicita-citakan oleh para pahlawan negara ini.

Dalam konteks di atas, maka diperlukan pemantapan akan kesepakatan tata nilai dan tata atur dalam berbangsa dan bernegara yang harus ditaati bersama dimana pelanggaran terhadapnya adalah sebuah bentuk penghianatan terhadap bangsa negara itu sendiri. Dalam hal ini, budaya bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa yang sudah banyak digali dari akar budaya dan tradisi yang hidup. Sayangnya, setelah digali, nilai-nilai itu cuma dimaklumkan tapi kurang dihayati dan diamalkan sehingga kekayaan nilai itu tertutup oleh kenyataan yang banyak menunjukkan runtuh dan hilangnya etika dan moral bermasyarakat dan berbangsa.

Seluruh warga bangsa Indonesia, lebih-lebih kaum muslimin yang merupakan golongan terbesar, harus benar-benar memahami pengertian “negara-bangsa” atau *nation-state* itu secara benar. “Negara-bangsa” adalah suatu gagasan tentang negara

yang didirikan untuk seluruh bangsa. Pengertian “bangsa” atau “*nation*” itu dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan istilah *ummah* (*ummatun, umah*).

Lebih ironis lagi adalah fakta keberagaman di Indonesia. Negara yang sempat menjadi kiblat kerukunan umat beragama, hubungan yang harmonis antar umat beragama, ternyata harus berurusan dengan konflik dan kerusuhan yang dibungkus dengan baju agama. Tentu, agama tak pernah punya salah, dan yang salah adalah yang memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan yang justru bukan seperti yang dianjurkan oleh agama itu, mulai dari interpretasi sampai pada aksi.

Tulisan yang sederhana ini akan mencoba mengelaborasi secara singkat dua hal di atas untuk didiskusikan bersama untuk mendapatkan pemahaman dan pencerahan: yaitu masalah akhlak dan moral bangsa dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

B. MORAL DAN AKHLAK BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dalam mengkaji masalah moral bangsa ini, ada pertanyaan yang seringkali ditanyakan tapi kerap kali tak ada jawaban yang memuaskan, yaitu “apakah bangsa ini punya kepribadian dan jati diri? Apa dan bagaimana kepribadian dan jati diri itu?” Jawaban akan pertanyaan ini sesungguhnya merupakan uraian akan etika, sifat, dan watak yang disadari dan disepakati secara umum (*commununal awareness and social consensus*) sebagai milik yang melekat pada bangsa Indonesia ini.

Yang telah kita sepakati adalah bahwa Pancasila telah menjadi dan dijadikan sebagai *common philosophical ground* (landasan filosofis bersama) dari pada wujud etos nasional dalam bentuk yang formal. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila saripati dari etika, watak dan kepribadian yang digali dari nilai tradisi dan budaya yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal perumusan formalnya, Pancasila tidaklah perlu lagi dipersoalkan. Nilai terbentuk atas dasar pertimbangan-pertimbangan cipta, rasa, karsa dan keyakinan seseorang atau sekelompok masyarakat/bangsa.¹

¹ Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 83

Sebagai Ideologi dan sumber etika bangsa, sayangnya, Pancasila baru efektif sebagai ideologi yang mempersatukan Indonesia secara politis dan belum menjadi landasan yang kokoh dan efektif sebagai ideologi ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini terjadi karena Pancasila dipahami lebih sebagai mitos ketimbang sejarah dan ilmu pengetahuan. Maka terjadilah mistifikasi Pancasila tapi kurang dijabarkan dan dihayati sebagai *common philosophical ground* seperti disebut di atas. Kebhinnekaan harus diterima sebagai kekayaan, dan serentak dengan itu keikaan berdasarkan kepentingan bersama secara nasional harus dipelihara.

Memang, kadang-kadang mitos lebih efektif dari pada ideologi pada saat-saat kritis seperti pada tahun 1965, sebab mitos bertumpu pada kepercayaan sedangkan ideologi pada intelektualitas. Tetapi pada waktu normal, mitos akan ditinggalkan dan orang akan merujuk pada ideologi yang lebih objektif dan konkrit. Barangkali karena kita terikat betul pada mitos inilah, Pancasila menjadi pasif dan tidak aktif sebagai tuntunan etika bangsa.

Karena itu, supaya efektif, Pancasila harus dibaca sebagai kalimat aktif, dan tidak sebagai frasa yang netral. Ketuhanan Yang Maha Esa harus dipahami dan di baca “Memahaesakan Tuhan” Kemanusiaan yang adil dan beradab harus dibaca “Memanusiakan manusia dengan penuh keadilan dan etika,” dan seterusnya. Dengan demikian, Pancasila akan aktif sebagai spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara jelas, kalau Pancasila memang telah menjadi sebuah kesepakatan bersama sebagai landasan etika berbangsa dan bernegara dan dilaksanakan secara konsekuen, maka tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku baik pada level eksekutif, legislatif, yudikatif, rakyat dan bidang lainnya. Tak perlu dijelaskan lagi bahwa hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan manusia serta prinsip keadilan dan musyawarah dalam membangun kebersatuan menuju cita-cita bangsa telah tercakup secara jelas dalam sila-sila Pancasila.

Untuk mengarahkan kepada pelaksanaan nilai-nilai etika tersebut di atas maka diperlukan ketegasan dan kejelasan pelaksanaan hukum yang memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan keteladanan pemerintah pada rakyatnya.

Lebih lanjut lagi, pelaksanaan hukum yang baik dan aplikasi nilai-nilai dasar etika bangsa seperti disebut di atas akan membuka lebar-lebar pengembangan kehidupan yang harmonis dalam semua bidang kehidupan, sehingga konflik SARA yang saat ini masih marak bisa dieliminasi dan diatasi dengan baik. Peran agama, seharusnya sangat besar dalam mendukung kondisi yang kondusif, dan umat beragama harusnya berperan aktif dalam proses ini. Sayangnya, realitas empirik menunjukkan fakta yang berbeda. Agama dijadikan tameng kepentingan, umat beragama mempermainkan ayat dan ajaran agama untuk disesuaikan dengan kehendak masing-masing, sehingga kerukunan antar umat beragama terancam retak. Hal inilah yang akan dibahas dalam kajian berikutnya.

C. PLURALISME DAN PROBLEMATIKA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Kehendak dan kuasa Tuhan adalah di atas segala-galanya. Adanya alam dan segenap pengaturannya adalah atas dasar kehendak dan kuasa-Nya. Beraneka ragamnya tumbuhan dan hewan serta bervariasinya model kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri. Berikut juga bermacamnya ras manusia, suku, warna kulit dan agama adalah sesuatu yang harus dicari hikmahnya, karena Tuhan tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

Multikultural, multietnis, multi agama dan semacamnya yang kerap disebut dengan pluralisme adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan dengan kehendak agar ada saling kenal dan berinteraksi secara harmonis. Kata-kata “harmonis” itu sendiri lahir karena adanya perbedaan yang memiliki tendensi untuk berselisih, berseteru dan saling curiga.² Di sinilah kodrat dan nilai kemanusiaan diuji; apakah terlarut dengan tendensi negatif itu atautkah justru mampu membangun sesuatu yang konstruktif, positif dan indah di atas perbedaan-perbedaan itu.

Untuk sekian lama negeri ini dipuji banyak bangsa dengan hubungan yang harmonis antar agama. Indonesia banyak dikaji dan dijadikan referensi potret positif hubungan antar agama yang harmonis. Bangsa ini pun bangga dan terbuai dengan pujian itu. Tapi, dalam realitasnya, apakah memang sudah sempurna wajah hubungan keberagamaan itu? Masih adakah kendala? apa yang bisa dilakukan untuk

² Rakor Kebijakan Kepemudaan Prop. Jatim Membangun Kesalehan Sosial Generasi Muda Lintas Agama

mewujudkan kehendak Tuhan membangun bayang-bayang surga di bumi pertiwi ini?

D. PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

Bertitik tolak dari pandangan bahwa beragama adalah pilihan individual yang fitrah dan pilihan fitrah merupakan hak privasi setiap individu yang total dan utuh, maka pluralitas agama juga harus diakui keberadaannya secara utuh. Perbedaan agama bukanlah ancaman disintegrasi nasional, karena tidak ada agama yang menghendaki perpecahan. Tetapi, agama dapat menjadi pemicu perpecahan nasional ketika agama diperlakukan sebagai alat politik untuk merumuskan kepentingan pribadi dan golongan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pluralitas agama merupakan realitas yang patut diterima sebagai wujud anugerah Tuhan, adanya pluralitas agama semata-mata dengan mempertimbangkan aspek keragaman penilaian hak asasi manusia yang menempati persada bumi ini. Indonesia, misalnya, memiliki enam agama besar. Pilihan untuk beragama, salah satu diantaranya yang enam, adalah individual atas getaran suara hati nurani, bukan paksaan atau desakan, kecuali atas kesadarannya sebagai manusia yang bebas dan merdeka, alat-alat kekuasaan negara pun tidak berhak memaksa manusia untuk memilih agama tertentu. Karenanya, beragama merupakan hak yang sangat asasi pada setiap manusia yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, meskipun orang tua kandung, orang tua hanya sebatas membimbing agar dapat memilih yang tepat dan benar sesuai dengan alam pikiran sang anak.

Sebaliknya, jika sang anak telah memilih Islam, misalnya, maka perintah orang tua atau apalagi dari pemerintah dapat diabaikan bila bertentangan dengan tauhid. Dari perspektif ini, keberagamaan manusia merupakan pilihan fitrah, sehingga, tidak dibenarkan untuk saling mengganggu atau melecehkan antar sesama umat beragama maupun dengan umat agama lain. Dalam konteks yang demikian, sepatutnya agama diberikan hak dan perlindungan hukum yang sama, agar agama-agama tersebut dapat menjadi inspirasi bagi umatnya dalam membangun kehidupan secara bersama.

Jadi, berhadapan dengan agenda pluralitas agama yang sedang menggaung dalam bangsa ini, bangsa Indonesia, pertama kali perlu dipahami, bahwa agama bagi manusia berfungsi sebagai pedoman hidup, agar manusia selalu hidup sejalan dengan aturan dan dapat membangun keteraturan dalam sistem keduniaan. Setiap agama menekankan ajaran konsepsi hidup tentang keteraturan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, akan terjamin ketentraman hidup antara sesama umat manusia, sehingga tidak perlu terjadi lagi kasus Poso, Situbondo, Tasikmalaya, Ambon, dan sebagainya.

Realitas sosiologis menunjukkan bahwa keberagaman kita masing-masing lebih di pengaruhi oleh aspek emosional, dan cara keberagaman kita pun lebih bersifat “*given*” dari pada melalui kajian intelektual yang bersifat akademis. Tentu, proses ini mempengaruhi pemahaman kita yang sangat dangkal dan tidak mendalam, dan kemudian mempengaruhi perilaku umat beragama yang cenderung fanatik tanpa makna. Hal demikian ini merupakan fenomena bahkan realitas umum pada semua agama di Indonesia. Untuk itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana memperkuat peranan agama melalui kualitas umatnya dalam memahami agama secara akademik dan kualitatif. Pemahaman agama dengan visi dan misi yang kualitatif dan afirmatif kepada kejujuran, keadilan, dan kedamaian serta kesejahteraan tentu akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap proses bangunan integrasi nasional.

Doktrin agama memiliki horizon yang luas, doktrin itu menjadi sumber nilai bagi pembentukan kepribadian, ideologi bagi gerakan social dan perekat hubungan sosial. Doktrin agama mana yang dianut oleh komunitas manapun di belahan dunia ini megajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang baik, jujur, memiliki kasih sayang serta mencintai kedamaian dan membenci kekerasan.

E. PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI

Pluralitas masyarakat Indonesia menjadi problem tersendiri bagi kehidupan beragama dan berbangsa. Si satu sisi, pluralitas amat potensial untuk menjadi kekuatan penyadaran, apabila pluralitas tidak hanya dipahami sebagai kenyataan tentang adanya keanekaragaman kelompok agama dalam masyarakat, tetapi juga harus terjadi komunikasi aktif dan interaktif positif diantara kelompok-kelompok yang ada. Sementara disisi lain, pluralitas menyimpan potensi kerawanan sosial yang sangat

besar, terutama jika terjadi gesekan-gesekan kepentingan yang berbeda-beda. Kecenderungan suatu kelompok ataupun beberapa kelompok agama yang mempunyai kepentingan politik tertentu, tidak jarang menjadi penyebab ketegangan hubungan dalam kehidupan beragama.

Fenomena terakhir ini kerap terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Mengantisipasi munculnya fenomena tersebut, agaknya kini perlu mencari akar masalahnya terlebih dulu. Diyakini bahwa akar masalahnya terletak pada kelemahan gerakan reformasi “kebebasan dan keterbukaan” yang dilaksanakan selama ini. Pelaksanaan reformasi total yang di perjuangkan bersama masyarakat Indonesia selama ini tampak lebih terfokus pada perbaikan hubungan masyarakat dengan Negara (dialektika vertikal). Padahal idealnya kita semestinya tidak sekedar melakukan perbaikan sistem yang berkaitan dengan kerja-kerja struktur pemerintahan, dan hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Negara, melainkan juga menyangkut usaha perbaikan hubungan ditingkat masyarakat itu sendiri (dialektika horizontal) dengan cara mendorong terjadinya komunikasi aktif dan interaksi positif di antara kelompok-kelompok agama yang ada. Bila kita usahakan hal terakhir ini, maka akan terjadi saling pengertian antar warga masyarakat dalam menghadapi berbagai perbedaan dan persamaan secara lebih apresiatif.

Adanya keterbukaan dan saling pengertian pada tataran hubungan horizontal itu akan lebih berpengaruh terhadap terhadap perjalanan proses demokrasi secara pluralis (demokrasi pluralisme). Demokrasi akan lahir dan berkembang secara alamiah dari hubungan antar individu maupun kelompok agama yang terbilasa dengan toleransi yang dinamis. Dengan demikian, akan terasa *absurd* usaha membangun demokrasi pluralis bila pada tataran massa masih terpendam kecenderungan-kecenderungan tiranik dengan mengabaikan kompleksitas yang ada. Itu karena masyarakat demokrasi mensyaratkan adanya penghargaan akan multisiplitas subyek yang terbesar dalam berbagai kelompok masyarakat.

Dalam kasus Indonesia, yang memang sangat identik yang dengan masyarakat plural, ikhtiar membangun semangat menghormati keberagaman dan keberagamaan orang lain syarat mutlak untuk membangun kerukunan antar umat beragama bahkan mampu mencegah disintegrasi bangsa. Namun perlu dicatat, transformasi kehidupan bangsa menuju suatu tatanan demokrasi-pluralisakan bisa dicapai secara

baik apabila terlebih dulu dilakukan perubahan-perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan keterbukaan dalam masyarakat, ia akan tercapai secara baik apabila terlebih dulu terjadi proses saling mengerti dan saling mengembangkan cakrawala pemikiran. Itu artinya, jika kita hendak membangun kerukunan antar umat beragama, maka pluralisme aktif harus terlebih dulu membudaya dan membumi dalam setiap perilaku masyarakat dengan kata lain, pengembangan kesadaran masyarakat tentang budaya pluralisme aktif akan turut mengembangkan kelembagaan yang ada dengan perilaku yang demokratis.

Ketika orang lebih banyak bicara tentang pencapaian golongan ketimbang masalah-masalah fundamental bangsa ini, sementara semangat kebersamaan jadi melemah, pluralism sebagai sarana demokrasi itu dengan sendirinya sedang mengalami pelapukan. Menurut banyak kalangan, hal itu karena memang terkadang kepentingan bersama dan semangat kebangsaan seringkali terdesak oleh arus kepentingan pragmatisme. Masih menganjalnya masalah SARA seperti kesenjangan pri dan nonpri, Islam dan non-Islam, mayoritas dan minoritas dalam kerangka partisipasi kebangsaan, harus diakui sebagai kegagalan kita dalam mengartikulasikan perjuangan kebebasan “demokrasi”.

Masih menyeruaknya aksi-aksi kekerasan massal atau kerusuhan diberbagai tempat di Indonesia, di mana warga keturunan ataupun warga pendatang menjadi sasaran amukmassa, juga merupakan contoh konkrit dari kegagalan keterbukaan kita. Lebih parah, hla-hal seperti itu seringkali dijadikan lahan empuk komoditas politik oleh segelintir kelompok elite untuk kepentingan ambisi kekuasaannya. Karenanya, bagi bangsa Indonesia yang memang amat identik dengan masyarakat plural itu, membangun “pluralisme aktif” merupakan suatu “keniscayaan”. Untuk mencapai hal itu, kita harus mengupayakan intensitas pertukaran pandangan yang sehat dan jujur menuju pencapaian keseimbangan optimal antara emosi dan rasio.

Jika kita membangun pluralisme aktif, itu berarti juga kita berupaya mencegah terjadinya arus pengerahan watak puritanisme yang mengendap dalam tiap-tiap kelompok masyarakat. Tanpa pluralisme aktif, secara substansial kerukunan antar umat beragama tidak akan pernah berjalan sempurna, sebab akan tetap ada pemaksaan kepentingan yang didasarkan pada semangat sektarianisme. Padahal, bagi seorang pluralis, memperjuangkan suatu hal semestinya lebih didasarkan pada semangat “solidaritas semesta”.

Lebih dari itu, puritanisme yang mengkristal secara otomatis akan mengentalkan kecenderungan-kecenderungan tiranik. Kecenderungan seperti inilah yang secara aktif sudah ambil bagian dalam proses reproduksi ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Padahal, partisipasi demokratis tidak akan bisa diraih tanpa terlebih dulu mengubah ketimpangan sosial dan kesadaran masyarakat. Karenanya, perubahan kesadaran masyarakat untuk bebas dari semua ketimpangan harus diupayakan seoptimal mungkin. Sehingga pada akhirnya akan mengantarkan masyarakat menjadi agen-agen perubahan sosial yang aktif melalui bentuk partisipasi yang positif.

Hal itu dikemukakan karena mengingat bahwa demokrasi pada hakikatnya ialah proses keterburukan yang tak pernah menemui titik akhir. Karenanya pendewasaan dan penyadaran demokrasi harus terus menerus di serukan dan di rekonstruksi sesuai dinamika masyarakat. Untuk membawa masyarakat pada proses perubahan jangka panjang inilah makna mutlak di butuhkan komunikasi yang dialektis di antara kelompok-kelompok masyarakat beragama.

Dalam konteks seperti itulah perlu dilakukan introspeksi terhadap gerakan reformasi yang telah dilaksanakan selama ini. Seruan reformasi total hanya akan menjadi retorika tanpa makna bila nyatanya masih terpendam watak-watak tiranik untuk saling mendominasi antar kelompok agama yang satu dengan kelompok agama lainnya. Karena itu, kini harus dicamkan bahwa inti dari reformasi sesungguhnya ialah penataan kembali segala dimensi kehidupan beragama masyarakat yang mendasar. Bukan semata soal mengganti atau menjatuhkan orang yang berkuasa. Itu artinya, reformasi harus mencakup dua dimensi perbaikan, yakni perbaikan hubungan masyarakat dengan Negara, dan perbaikan hubungan di tingkat masyarakat itu sendiri. Konsep reformasi yang sangat paradigmatik itulah yang seringkali terdesak oleh kepentingan pragmatik, misalnya perebutan kekuasaan. Karena itu kini introspeksi harus dilakukan terhadap gerakan reformasi, yakni tidak melupakan menata kembali hubungan di tingkat masyarakat sehingga akan bisa merangsang munculnya pluralisme aktif yang bermanfaat untuk membangun kerukunan antar umat beragama.

F. ESQ: Pemaknaan Hakikat Hidup Menuju Keberhasilan Bersama

Pada uraian di atas disampaikan perlunya penyadaran-penyadaran setiap anak bangsa akan eksistensinya sebagai individu dan sebagai komunal masyarakat. Hal ini sangat menekankan pada aspek batin, emosional, *psychological state*, ketimbang pada tataran kemampuan logika akal. Penyadaran yang sangat bersifat intrisik ini diharapkan nantinya mengantarkan pada performa pola hubungan ekstrinsik keberagamaan yang lebih damai dan indah.

Pada domain ini, ESQ atau *Emotional and Spiritual Quotient* (kecerdasan emosional dan spiritual) layak untuk di lirik guna memberikan pemaknaan yang lebih intensif tentang urgensi kesadaran akan pluralitas masyarakat dan urgensi kerukunan umat beragama.

Tentang kecerdasan emosional ini, Goleman (1997), mengatakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. Lebih lanjut Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotifasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan dalam mengatur suasana hati.

Sementara Cooper dan Sawaf (1998) mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energy dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasa emosi menuntut pemilikan perasaan, untuk belajar mengakui, menghargai parasaan pada diri dan orang lalliln serta menanggapinya dengan tepat, menerapkan secara efektif energy emosi dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya Howes dan Herald (1999) mengatakan pada intinya, kecerdasan emosional merupakan komponin yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosi. Lebih lanjut dikatakannya bahwa emosi manusia berada diwilayah dari perasaan lubuk hati, naluri yang tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan di hormati, kecerdasan emosional menyediakan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih utuh tentang diri sendiri dan orang lain.

Dari beberapa pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa kecerdasan emosional menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain dan untuk menanggapi dengan tepat, menerapkan dengan efektif energy emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Secara umum, Goleman menyebutkan bahwa ada dua (2) unsur penting kecerdasan emosional terdiri dari: kecakapan pribadi (mengelola diri sendiri); dan kecakapan sosial atau keterampilan sosial (kepandaian membangun hubungan dan menggugah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain).

Sementara itu tentang kecerdasan spiritual ada beberapa catatan penting yang perlu dicermati dengan baik. Barangkali, buku Danah Zohar dan Ian Marshal, *SQ: Spiritual Intelligence the Ultimate Intelligence*, adalah yang pertama mengupas secara detail eksistensi, definisi dan peran SQ dalam kehidupan manusia, walaupun sebenarnya SQ itu sendiri umurnya adalah setua umur kemanusiaan. Beberapa bukti ilmiah dikemukakan, mulai dari penelitian neoropsikolog Michael Persinger pada awal tahun 1990-an dan V.S. Ramachandran tahun 1997 tentang *god spot* (titik ketuhanan) dalam otak manusia, penelitian Neorolog Austria Wolf Singer tahun 1990an tentang “problem ikatan” yang mengungkapkan adanya proses saraf dalam otak yang digunakan untuk memberikan makna atas pengalaman hidup sampai pada penelitian Rodolfo Llinas dan Neorolog serta pakar biologi Harvard, Terrence Deacon, yang memiliki kesimpulan sama tentang adanya peranan tersembunyi yang selama ini terabaikan sementara ia berperan sangat vital dalam kehidupan manusia. Dalam buku ini, penulis menyatakan beberapa ciri yang dimiliki oleh mereka yang berkecerdasan spiritual sempurna, yaitu: (1) kemampuan bersikap fleksibel; (2) tingkat kesadaran yang di miliki tinggi; (3) kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan ; (4) kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit; (5) kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai; (6) keengganan untuk mengalami kerugian yang tidak perlu; (7) kemampuan untuk melihat keterkaitan berbagai hal; (8) memiliki kecendrungan bertanya ”mengapa” atau “bagaimana jika” dalam rangka mencari jawaban yang mendasar; serta (8) memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri.

Sementara itu, tokoh lain bernama Roberts A. Emmons dalam bukunya yang berjudul *The Psychology of Ultimate Concerns* menyatakan lima cirri utama yang dimiliki oleh mereka yang cerdas spiritual (1) kemampuan untuk mentransendensikan yang fisik dan material; (2) kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang

memuncak; (3) kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hati; (4) kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual untuk menyelesaikan masalah; dan kemampuan untuk berbuat baik; dan (5) *thecapacity to engage in virtuous behavior: to show forgiveness, to express gratitude, to be humble, to display compassion and wisdom*; kemampuan untuk berbuat amal baik: member manfaat, mengekspresikan terima kasih, sederhana dan bersahaja, serta menunjukkan kasih sayang dan kebijaksanaan.

Kalau direnungkan poin-poin dasar di atas, maka ESQ mendorong orang untuk memiliki pemahaman diri dan pemahaman orang lain yang baik sehingga mampu memberikan manfaat untuk diri dan sekitarnya secara maksimal. Ketika muncul sebuah persoalan atau konflik, maka bukan fakultas rasio saja yang digunakan melainkan juga fakultas rasa sehingga tidak terjebak pada kepentingan sesaat dan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok, melainkan untuk sesuatu yang mulia dan agung berupa kepentingan bersama, universal, yang bersifat perennial dan jangka waktu yang lama. Membangun bayang-bayang sorga nan damai, sejuk dan rukun di bumi ini adalah perintah dari setiap agama.

G. PENUTUP

Membaca deskripsi dan analisis di atas, jelas bahwa usaha untuk lebih harmonis, efektif, dan lebih mengemukakan kesejukan ajaran agama menjadi sebuah harapan untuk mempertahankan NKRI dan mengembangkannya menjadi Negara yang tersisikan dengan rahmat Tuhan, penuh dengan kedamaian bukan kerusuhan, keadilan bukan kesewenang-wenangan dan kesejahteraan bukan keresahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka ini, maka peran dan kewajiban tokoh agama menjadi sangat vital dan menjadi salah satu pilar besar terciptanya kerukunan antar umat beragama dan terbangunnya masyarakat madani (*civilized society*) yang sering disebut-sebut itu. Peran dan kewajiban tersebut antara lain adalah:

1. Menanamkan makna agama yang sesungguhnya, bukan hanya simbol-simbol yang cenderung berbeda satu sama lainnya. Pemahaman agama yang benar dan perenungan yang mendalam diharapkan akan memunculkan kebijakan (*wisdom/hikmah*) dalam memahami dan menyampaikan pesan agama bagi masyarakat. Dalam hal ini, para pakar, pemikir dan praktisi mengatakan bahwa

penekanan pemahaman agama pada dimensi filosofis dan spritual telah mampu memancarkan wajah agama yang ramah, harmonis, toleran dan bersahabat.

2. Membangun hubungan yang dialektis harmonis, antara tokoh dan pemuka agama dengan pemerintah sehingga tidak ada lagi kesan bahwa tokoh agama hanya menjadi pemadam kebakaran, yang dibuang ketika aman-aman saja, baru dicari-cari ketika ada kerusuhan. Hubungan ini harus bersifat rutin dan mencakup banyak hal terutama yang berkaitan dengan hubungan baik antar umat beragama.
3. Membangun hubungan yang baik dengan tokoh dan pemuka agama yang lain, dialog menjadi sangat penting dan kebersamaan dalam satu aktivitas sosial merupakan contoh yang baik untuk masyarakat awam. Konflik personal antar tokoh tidak akan melahirkan apa-apa melainkan hanya keresahan dan bisa jadi permusuhan di kalangan masyarakat biasa.
4. Tokoh dan pemuka agama, terlepas dari dirinya sebagai manusia biasa yang sangat mungkin berbuat kesalahan, senantiasa dituntut oleh kenyataan untuk tampil sebagai teladan, contoh dan guru segenap masyarakatnya. Tidak bisa disangkal bahwa masyarakat kita masih sangat kental dengan pa yang di sebut sebagai *karisma*. Tokoh yang memiliki *karisma* di wilayah dan di daerah masing-masing memiliki beban moral yang luar biasa dalam konteks ini.

Semoga kita mampu menjalani peran dan kewajiban ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi hidayah dan perlindungan-Nya. *Amin.* []

Daftar Pustaka

- Bruinessen, Martin Van, (1994). *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Husaini, Adian. (2005). *Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Imarah, Muhammad. (1999). *ISLAM DAN PLURALITAS Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta : Gema Insani Press.

Karim, Muchit A., (2009). *Tarekat Amaliyah: Media Dakwah bagi Masyarakat Kota Jakarta, dalam jurnal Multikultural dan Multirelegius*, Volume VIII, Nomor 30, April-juni 2009

M, Zainudin. (2010). *Pluralisme Agama*. Malang : UIN Maliki.

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme

Rujukan dari Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme_agama